







BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga
melayani
bangsa**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
Surabaya

2023

-  Jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya
-  persuratanpttunby@gmail.com
-  <https://pttun-surabaya.go.id>
-  (031) 8292138

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2023 ini.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) ini merupakan laporan yang menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selama tahun 2023, berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan atas perbandingan antara realisasi kinerja dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diuraikan mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja selama tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan amanat yang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2020 - 2024.

Adapun Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut telah ditetapkan program-program, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
2. Program Dukungan Manajemen.

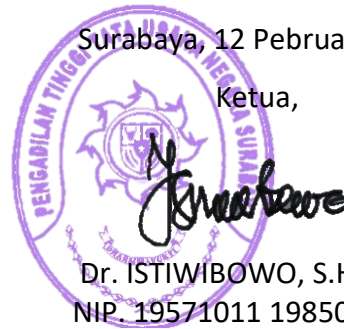
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah berusaha secara maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dengan melaksanakan program-program tersebut secara optimal.

Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan dan beberapa indikator dapat melebihi target. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta seluruh jajarannya, masyarakat dan stakeholder yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan public serta terwujudnya aparatur pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan serta akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Surabaya, 12 Pebruari 2024

Ketua,



Dr. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H.
NIP. 19571011 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA	7
D. PERMASALAHAN UTAMA	9
1. Kekuatan (Strenght)	10
2. Kelemahan (Weakness).....	11
3. Peluang (Oportunities)	11
4. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi (Threats).....	12
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024.....	14
1. Visi Misi	14
2. Tujuan	15
3. Sasaran Strategis	16
4. Pohon Kinerja.....	17
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	18
C. PERJANJIAN KINERJA	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	19
1. Perbandingan Target dan Realisasi	22
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	23
3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah	23
4. Analisis Capaian Kinerja.....	24
B. REALISASI ANGGARAN 2023.....	33

BAB IV PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. SARAN	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Kinerja Tahun 2023	viii
Tabel 2	Sasaran Strategis	16
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 5	Jenis perkara yang masuk sebagai Tingkat Banding di tahun 2023	21
Tabel 6	Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2023	21
Tabel 7	Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	22
Tabel 8	Perbandingan Presentase Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya th. 2022-2023	23
Tabel 9	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah	23
Tabel 10	Sasaran Strategis 1	24
Tabel 11	Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu di Th. 2021 s/d 2023	26
Tabel 12	Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2023	27
Tabel 13	Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2021 s/d 2023	28
Tabel 14	Capaian Persentase Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di Th. 2023	30
Tabel 15	Capaian Persentase Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di Th. 2022 s/d 2023	30
Tabel 16	Sasaran Strategis 2	31
Tabel 17	Capaian Persentase di Th. 2021 s/d 2023	32
Tabel 18	Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tahun 2021 s/d 2023	33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan Jumlah Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2021 s/d 2023	28
Grafik 2	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2021 s/d 2023	28
Grafik 3	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu di Th. 2021 s/d 2023	32
Grafik 4	Perbandingan Presentase Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA dan DIPA 05 Th. 2021 s/d 2023	34
Grafik 5	Perbandingan Presentase nilai IKPA Th. 2022-2023	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	2
Gambar 2	Struktur Organisasi	9
Gambar 3	Pohon Kinerja	17

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaga selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun Anggaran 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk melaporkan “Pencapaian Kinerja” (*Performance Result*) selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan “Rencana Kinerja” (*Performance Plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada “Rencana Strategis” (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 – 2024.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111.11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	63.68%	141.51%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	91%	113.75%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					122.12%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	100%	111.11%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2					111.11%
Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator					116.62%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

“Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa :

“Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”

Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Renstra 5 (lima) tahunan Tahun 2020 – 2024.

Pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2022 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Gambar 1. Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



1. Kedudukan

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan

kepentingan, perselisihan/sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan eksekusi;
- Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);

- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset/penelitian;

Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat kekhususan, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara disamping sebagai Pengadilan Tingkat Banding juga bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara-perkara yang diatur dalam Pasal 48.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administrasi yang tersedia.**
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.**

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 1993 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, meliputi daerah propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu dari :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
- Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
- Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan :

- Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir;
- Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan tehnik yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan di bidang admnistrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;

- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian;

Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada **Standar Operasional Prosedur (SOP)**, yang telah dievaluasi pada tanggal 14 Januari 2017 seiring dengan diterimanya **Sertifikasi ISO 9001:2015** oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Mei 2017. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang **Pelayanan Publik** yang memuat antara lain sebagai berikut :

- Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja;
- Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
- Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
- Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Tersedianya system pengelolaan organisasi;
- Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2022, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai “**A (Exellent)**” sesuai dengan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : TASPM.04-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2022.

Untuk saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta seluruh wilayah hukumnya sedang berjuang membangun komitmen bersama untuk mewujudkan **Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)** yang menjadi salah satu tujuan **Reformasi Birokrasi**.

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibantu oleh Wakil Ketua sebagai unsur pimpinan, Hakim Tinggi dan Panitera/Sekretaris.

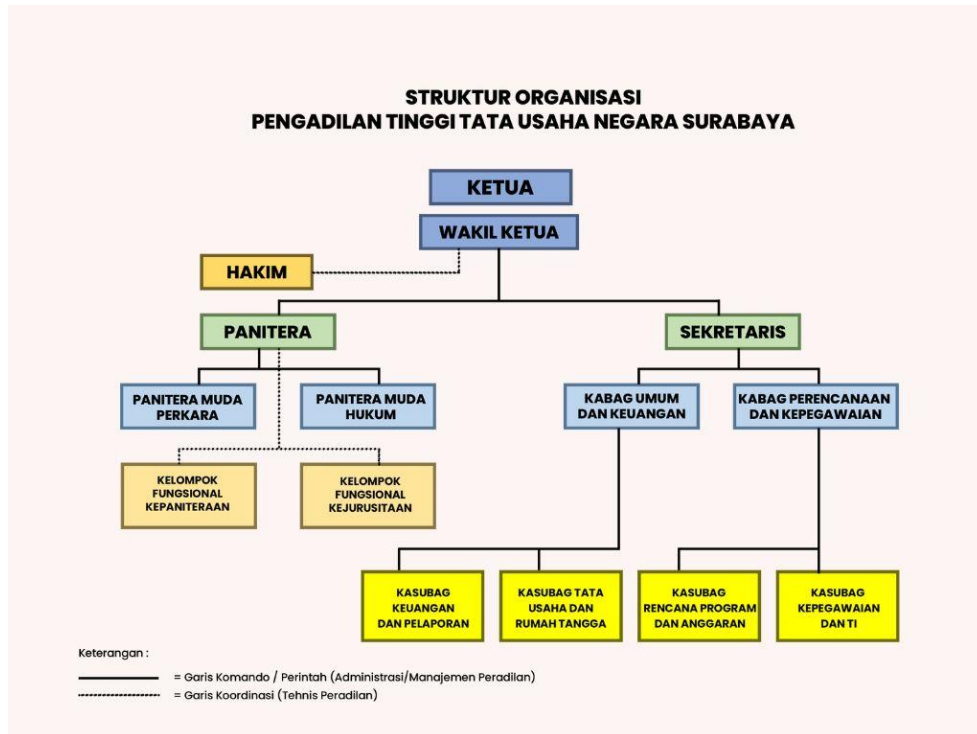
Seiring dengan terjadinya perubahan struktur di Mahkamah Agung RI yang ditandai adanya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, hal itu juga berlaku pada badan peradilan di empat lingkungan peradilan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, adalah sebagai berikut :

- 1) Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
- 2) Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman;
- 3) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh seorang Panitera;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Hukum, disamping itu juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti;
- 5) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Keuangan serta Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- 7) Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga serta Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan;

8) Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran serta Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tehnologi Informasi; Adapun struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, seperti tergambar di bawah ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi



D. PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai salah satu pilar utama terjaminnya pelaksanaan kepastian hukum di Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya baik hambatan yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. selain memiliki beberapa hambatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga memiliki potensi yang apabila potensi tersebut dapat dimaksimalkan dapat mendukung optimalisasi kinerja serta pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan.

Dengan melakukan analisis pada hambatan dan potensi yang ada, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat memanfaatkannya untuk

meningkatkan kinerja. berikut analisis permasalahan dan potensi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

1. Kekuatan (Strenght)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan, meliputi :

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan voorpost (kawal depan) bagi Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dalam pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.
- g. Transparansi peradilan.

Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masyarakat pencari keadilan dimudahkan dengan mengakses informasi dari pengadilan berupa Aplikasi Siratus (Aplikasi Perkara Putus) di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan juga Aplikasi PTSP Online.

2. Kelemahan (Weakness)

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Terbatas/kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.

Belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Belum seluruhnya Pejabat Struktural dan pejabat Fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.

b. Manajemen dan Efisiensi dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan secara efisien belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.

c. Aspek Proses Peradilan

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

d. Sarana Pengawasan

Sarana pengawasan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sarana yang menunjang berupa aplikasi pengawasan.

3. Peluang (Opportunities)

Restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan badan-badan peradilan di bawah wilayah

hukumnya, adapun peluang-peluang yang dimiliki PTTUN Surabaya untuk mengembangkan organisasi, antara lain :

- a. Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;
- b. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- c. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- d. Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas diperlukan demi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.
- e. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan TI.
- f. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

4. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi (Threats)

a. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat/media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan sehingga belum dapat diketahui sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya belum seluruhnya menguasai Teknologi Informasi yang berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.

c. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Terus bertambahnya jumlah perkara diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat sementara ketersediaan pegawai yang terbatas.

Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Terbatasnya anggaran untuk sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, termasuk untuk pembinaan dan pengawasan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tahun 2023. Capaian kinerja (performance result) 2022 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan sistematika penyajian ;
- Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama ;
- Bab III : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun 2023;
- Bab IV : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat diuraikan sebagai berikut

1. Visi Misi

V i s i adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun **Visi** dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menetapkan **M i s i** yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Rumusan ***tujuan strategis*** tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- b. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

3. Sasaran Strategis

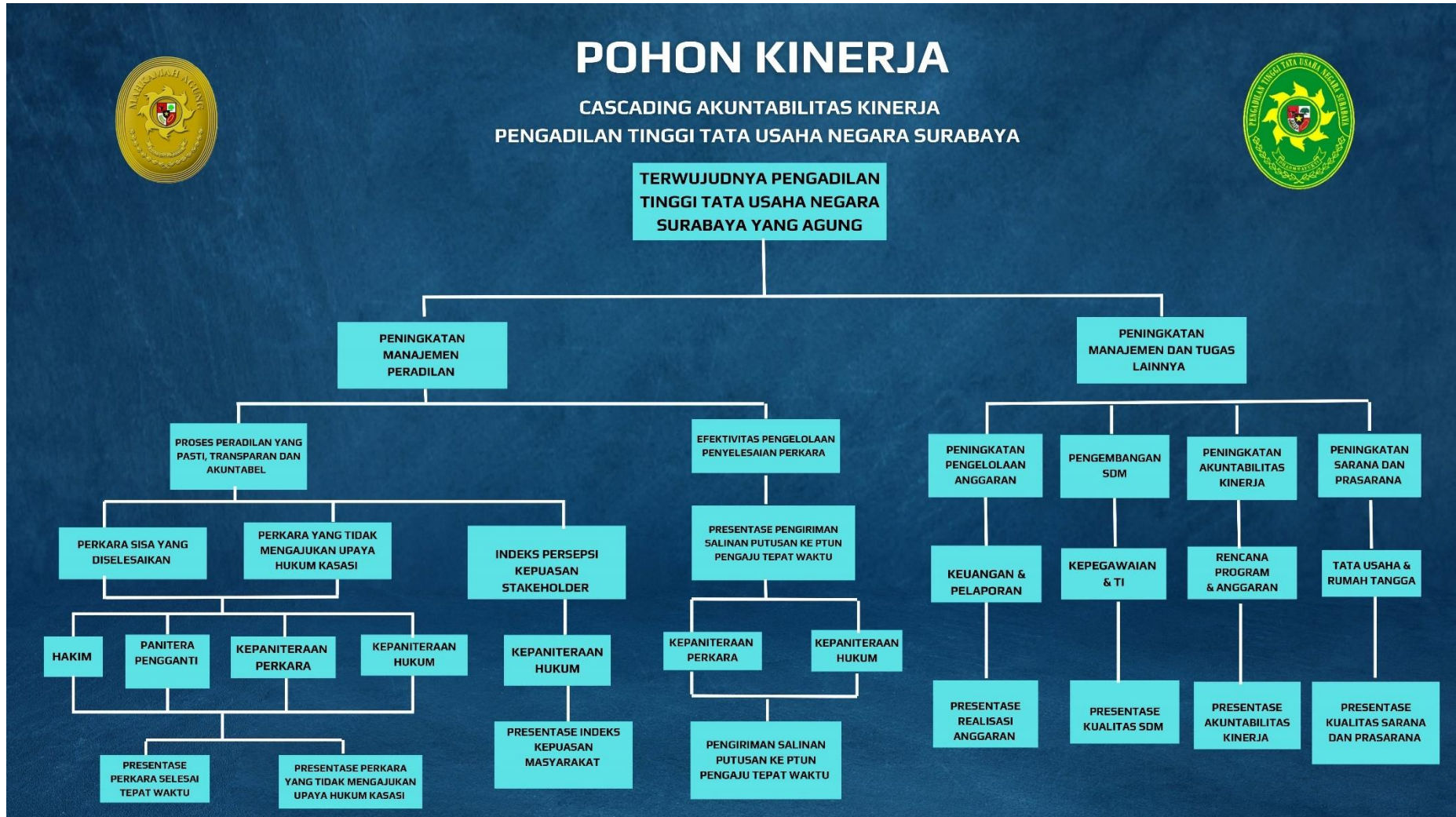
Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menetapkan **sasaran strategis**, sebagai berikut :

Tabel 2. Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

4. Pohon Kinerja

Gambar 3. Pohon Kinerja



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	90%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	45%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2023 dinyatakan berhasil mencapai target, pada dua sasaran strategis berhasil memperoleh rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu : sebesar **116,62%**. Untuk Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” sebesar **122,12%**. Untuk Sasaran Strategis 2 “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar **111,11%**.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2023, maka perlu dijabarkan terlebih dahulu keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai berikut

a. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Pertama

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selain menjadi pengadilan tingkat banding juga berperan sebagai pengadilan tingkat pertama dalam beberapa klasifikasi perkara. Setidaknya ada 4 klasifikasi jenis perkara tingkat pertama yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Yang pertama adalah sengketa pemberhentian PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan Perma Nomor 2 tahun 2023. Yang kedua adalah sengketa Pemilihan sesuai dengan Perma Nomor 11 tahun 2016 sengketa tata usaha negara pemilihan dan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan. Yang ketiga adalah sengketa pengadaan barang jasa sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2011. Dan yang terakhir adalah sengketa kewenangan mengadili di daerah hukumnya sesuai dengan Pasal 51 ayat(2) UU Nomor 5 tahun 1986.

Selama tahun 2023, perkara tingkat pertama yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 2 Perkara. Yaitu perkara lelang dan perkara kepegawaian. Dari keseluruhan perkara di tahun 2023, satu perkara telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

b. Keadaan Perkara sebagai Tingkat Banding

Pada tahun 2023, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 187 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2022 yang belum diselesaikan sejumlah 14 Perkara, sehingga beban perkara yang harus diselesaikan di tahun 2023 adalah sejumlah 201 Perkara.

Dari keseluruhan perkara di tahun 2023 sejumlah 201 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 190 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2023 adalah sejumlah 11 Perkara.

Berikut dapat digambarkan jenis jenis perkara tingkat banding yang masuk di tahun 2023 dalam matriks tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jenis perkara yang masuk sebagai Tingkat Banding di tahun 2023

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Pertanahan	113
2	Lain-lain	20
3	Kepala Desa & Perangkat Desa	32
4	Perijinan	2
5	Kepegawaian	11
6	Tindakan Administrasi Pemerintah/ Tindakan Faktual	5
7	Ketenagakerjaan	3
8	Pergantian antar Waktu	1
	Jumlah	187

c. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan untuk diselesaikan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI di tahun 2023 ini, adalah sebagai berikut :

1) Sebagai Tingkat Pertama

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama ada dua perkara yang masuk, dari keseluruhan perkara yang masuk satu perkara sudah diselesaikan dan diputus, dan perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan.

2) Sebagai Tingkat Banding

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah hukumnya, dapat digambarkan dalam matriks berikut ini :

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	40
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	27
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	2
	Jumlah Total	69

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111.11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	63.68%	141.51%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	91%	113.75%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					122.12%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	100%	111.11%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2					111.11%
Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator					116.62%

Target Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun 2023 dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan dan bahkan lebih. Capaian ini dapat diraih berkat komitmen dan sinergitas dari seluruh Sumber Daya Manusia terkait dalam menyelesaikan tugas sehari-hari.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 8. Perbandingan Presentase Capaian Kinerja PTTUN Surabaya th. 2022-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111.11%	90%	100%	111.11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	63.68%	141.51%	45%	55.84%	124.09%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	91.00%	113.75%	80%	88.48%	110.60%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					122.12%			115.27%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	100%	111.11%	90%	100%	111.11%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2					111.11%			111.11%
Rata-Rata Capaian Seluruh Indikator					116.62%			113.19%

Seluruh Target Kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2023 telah tercapai. Dengan meningkatkan komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel diatas kami dapat mempertahankan realisasi dan bahkan terdapat progres peningkatan pada presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			Target Jangka Menengah
		Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111.11%	90%
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	63.68%	141.51%	45%
	c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	91%	113.75%	80%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	100%	111.11%	90%

Seluruh Target Kinerja pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada Tahun 2023 telah tercapai. Bahkan teralisasi diatas target yang ditentukan, bila dibandingkan dengan target jangka menengah. dapat dilihat pada tabel diatas, realisinya melampaui target jangka menengah.

4. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Oleh karena itu, maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 10. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111.11%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	63.68%	141.51%
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	91%	113.75%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1					122.12%

a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pengukuran capaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah perbandingan antara Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tahun Berjalan dengan Jumlah Perkara Yang Ada.

Sebagai Tingkat Pertama :

Selama tahun 2023 ada 2 perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, 1 perkara diputus tepat waktu pada

tahun 2023 dan 1 perkara belum diselesaikan dan diputus di tahun 2023 sehingga menjadi beban kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian maka realisasi Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai tingkat pertama sebesar 100%.

Sebagai Tingkat Banding :

Secara keseluruhan jumlah perkara banding yang masuk di tahun 2023 adalah sejumlah 187 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2022 sebanyak 14 perkara, sehingga menjadi sejumlah 201 perkara.

Dari 201 perkara tersebut telah diputus dan diselesaikan sejumlah 190 perkara termasuk didalamnya sisa perkara tahun 2022, sedangkan sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2023 adalah sejumlah 11 perkara.

Dari uraian diatas yang menjadi beban kinerja untuk diselesaikan di tahun 2023 adalah sejumlah 190 perkara, sedangkan sisa 11 perkara menjadi beban kinerja di tahun berikutnya.

seluruh perkara banding sejumlah 190 perkara telah diselesaikan tepat waktu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, tidak melebihi batas waktu 3 bulan.

Dari keterangan diatas dapat dilakukan perhitungan pencapaian kinerja untuk indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebagai berikut :

$$\frac{190 \text{ (jml. perkara yang diselesaikan tepat waktu)}}{190 \text{ (jml. perkara yang diselesaikan)}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka target untuk pengukuran indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu sebesar 100% telah tercapai, sehingga capaian untuk kinerja indikator ini sebesar **111,1%**.

Berikut ini Tabel dan grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Tabel 11. Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu di Th. 2021 s/d 2023

No	Tahun	Perkara Yang Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	248	248	100%	100%	100%
2.	2022	197	197	90%	100%	111,1%
3.	2023	190	190	90%	100%	111,1%

Jika dilihat lebih lanjut dalam 3 tahun terakhir, perkara putus yang diselesaikan selalu terealisasi 100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi pada perkara yang putus selalu diselesaikan tepat waktu, dan dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 dapat selalu tercapai realisasinya dalam tiga tahun terakhir. Pencapaian ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dalam menangani perkara yang masuk.
- b. Seluruh Majelis Hakim telah membuat court calender, guna memonitoring perkara yang ditangani.
- c. Adanya monitoring dan evaluasi perkara yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan.

b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pada indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.

Sebagai Tingkat Pertama :

Selama tahun 2023 ada 2 perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, 1 perkara diputus tepat waktu pada tahun 2023 dan 1 perkara belum diselesaikan dan diputus di tahun 2023 sehingga menjadi beban kinerja di tahun berikutnya. Dan satu perkara tersebut tidak melakukan upaya hukum. Dengan demikian maka realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai tingkat pertama sebesar 100%.

Sebagai Tingkat Banding :

Berdasarkan data dari tingkat pertama di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selama tahun 2023 perkara yang mengajukan upaya hukum, tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 12. Rekapitulasi Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	40
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	27
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	2
	Jumlah Total	69

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkara yang mengajukan Kasasi sebanyak 69 perkara.

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tahun 2023 sebanyak 190 perkara, sehingga perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak **121 perkara**.

Jika dilakukan pengukuran terhadap indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\frac{121}{190} \times 100\% = 63,68\%$$

Dari pengukuran diatas, didapat sejumlah **63,68%** untuk realisasi indikator ini, target pencapaian perkara yang tidak diajukan kasasi pada Tahun 2023 adalah 45%, sehingga apabila diperbandingkan antara persentase keduanya, maka ditemukan bahwa pencapaian target perkara banding yang tidak diajukan kasasi adalah sebesar **141,51 %**.

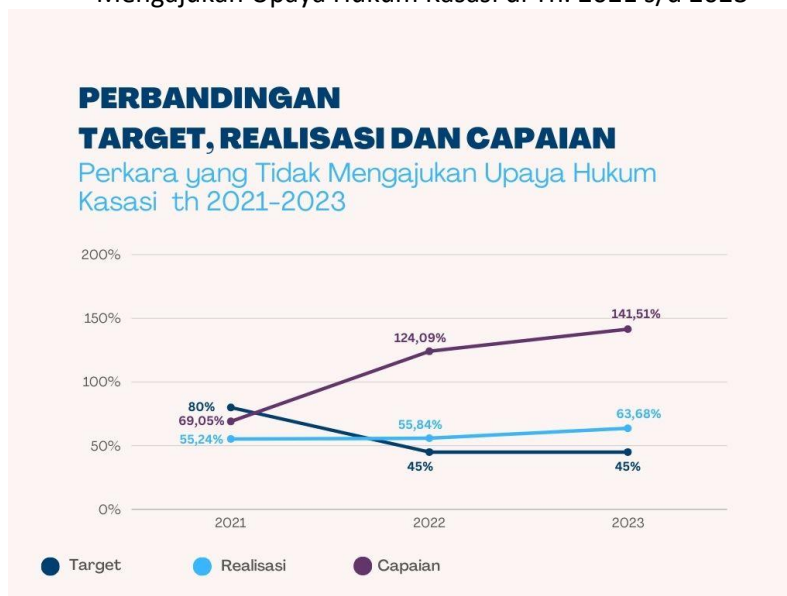
Grafik 1. Perbandingan Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2021 s/d 2023



Tabel 13. Capaian Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	TUN	137	80%	55,24%	69,05%
2.	2022	TUN	124	45%	55,84%	124,09%
3.	2023	TUN	121	45%	63,68%	141,51%

Grafik 2. Perbandingan target, Realisasi dan Capaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Th. 2021 s/d 2023



Jika melihat pada jumlah perkara yang diputus terdapat penurunan dalam jumlah, hal ini dikarenakan berkurangnya satuan kerja pada wilayah hukum pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, akan tetapi jika dilihat pada presentase realisasi terdapat progres yang meningkat pada tiga tahun terakhir. Adanya pengkajian ulang target pada tahun 2021 dari 80% menjadi 45% berimbang positif pada presentasi capaian yang diraih, dapat dilihat pada grafik capaian pada indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merangkak naik pada tiga tahun terakhir. Pencapaian ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Seluruh aparaturnya yang menangani perkara di Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Adanya Pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan.
- c. Adanya peningkatan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya.

c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperoleh dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditayangkan di website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk periode Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

Nilai Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 memperoleh rata rata realisasi sebesar 91% dari target 80%. Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar 113.75%. Capaian indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 14. Capaian Persentase Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di Th. 2023

Indeks Presepsi Stakeholder				
No	2023	Target	Realisasi	Capaian
1	Triwulan I	80%	90.75%	113.44%
2	Triwulan II	80%	88.00%	110.00%
3	Triwulan III	80%	86.75%	108.44%
4	Triwulan IV	80%	98.50%	123.13%
	Rata-rata	80%	91.00%	113.75%

Tabel 15. Capaian Persentase Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di Th. 2022 s/d 2023

Indeks Presepsi Stakeholder				
No	tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	80%	88.48%	110.60%
2	2023	80%	91.00%	113.75%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari presentasi realisasi yang meningkat dari 88,48% menjadi 91% di tahun 2023. Pencapaian ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Seluruh aparatur pada Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Adanya Pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan.
- c. Sarana pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah sesuai standart begitu pula dengan layanan untuk disabilitas
- d. Evaluasi dan tindaklanjut yang dilakukan terhadap nilai terendah pada survei sebelumnya

- e. Penerapan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) yang diterapkan oleh seluruh aparatus Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya.

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 16. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%	100%	111,11%

a. Persentase Salinan Putusan yang Dikirim kepada para pihak / Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Tingkat Banding Yang Dikirim Tepat Waktu dengan Jumlah Putusan adalah cara pengukuran indikator ini. setelah perkara putus hingga diminutasi dengan tidak melebihi waktu 3 bulan penyelesaian perkara sesuai surat SEMA No. 2 Tahun 2014, maka berkas perkara langsung dikirim ke pengadilan pengaju

Dari keseluruhan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2023 sejumlah 190 perkara telah dikirim ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu. Pengukuran indikator ini dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\frac{190}{190} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan pengukuran diatas target 100% untuk indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu telah tercapai.

Dengan diberlakukannya E-Court, pengiriman dilakukan secara digital melalui Aplikasi SIPP. Pemanfaatan Teknologi Informasi ini membantu mempercepat penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Pengaju sehingga tepat waktu Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 17. Capaian Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu di Th. 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat Waktu Ke Pengadilan Pengaju	Target	Realisasi	Capaian
1	2021	248	248	100%	100%	100%
2	2022	197	197	100%	100%	100%
3	2023	190	190	90%	100%	111%

Grafik 3. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu di Th. 2021 s/d 2023



Jika dilihat dari tabel dan grafik diatas, presentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu dapat direalisasikan 100% pada 3 tahun terakhir. Dan pada tahun 2023 capaian naik menjadi 111% dikarenakan adanya penurunan target ditahun tersebut. Jika dilihat lebih lanjut, indikator ini selalu melebihi target jagka menengah Rencana Strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan sebesar 90%. Pencapaian ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- Pemberlakuan E-Court pada perkara, sehingga pengiriman dilakukan secara digital melalui Aplikasi SIPP
- Seluruh aparaturnya pada Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Surabaya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Adanya Pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi yang dilakukan secara rutin oleh pimpinan.

B. REALISASI ANGGARAN 2023

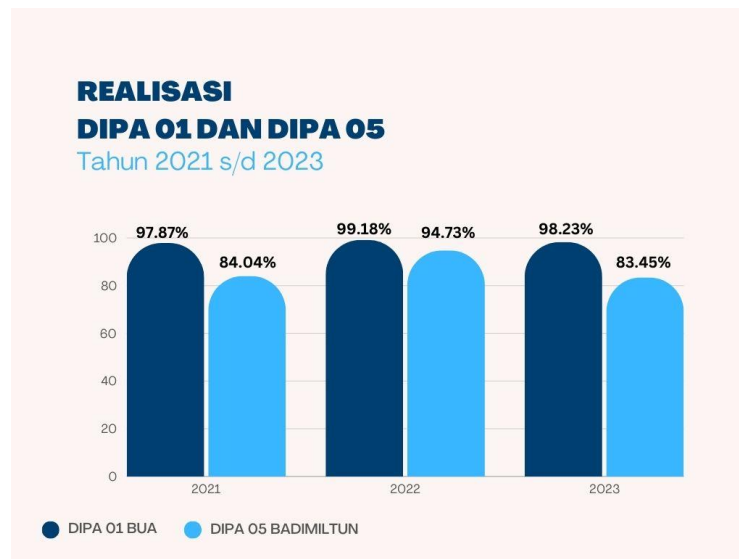
Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh pada tahun 2023 mendapatkan alokasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 15.483.598.000,- dan DIPA 05 Direktorat Henderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebesar Rp. 173.600.000,- dibawah ini kami sajikan Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA tahun 2023 dengan tahun sebelumnya:

Tabel 18. Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tahun 2021 s/d 2023

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	DIPA 01 BUA									
	Belanja Pegawai	12,969,175,000	12,835,115,782	98.97	12,384,521,000	12,355,630,376	99.77	10,635,875,000	10,404,551,899	97.83
	Belanja Barang	3,016,484,000	2,803,419,566	92.94	3,385,449,000	3,314,272,245	97.90	2,876,223,000	2,851,203,820	99.13
	Belanja Modal	315,500,000	314,650,000	99.73	1,756,500,000	1,713,126,735	97.53	1,971,500,000	1,953,531,716	99.09
	Jumlah	16,301,159,000	15,953,185,348	97.87	17,526,470,000	17,383,029,356	99.18	15,483,598,000	15,209,287,435	98.23
2	DIPA 05 BADIMILTUN									
	Belanja Barang	297,000,000	249,610,000	84.04	240,379,000	227,721,670	94.73	173,600,000	144,877,574	83.45
	Jumlah	297,000,000	249,610,000	84.04	240,379,000	227,721,670	94.73	173,600,000	144,877,574	83.45

Grafik 4. Perbandingan Presentase Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA dan DIPA 05 Th. 2021 s/d 2023



Keterangan :

a. Program Dukungan Manajemen

1. Belanja Pegawai

Terdapat penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 1,94% dikarenakan terdapat beberapa pegawai yang pensiun pada tahun 2023.

2. Belanja Barang

Pada Belanja Barang terdapat kenaikan penyerapan anggaran sebesar 1,23%.

3. Belanja Modal

Pada Belanja Modal terdapat kenaikan penyerapan anggaran sebesar 1,56%.

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Terdapat Penurunan penyerapan anggaran sebesar 11,28% untuk belanja barang pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum DIPA 05 Badimiltun. Ini dikarenakan cara bayar dengan menggunakan LS, dan setelah realisasi Bimtek terdapat pengembalian.

Dengan adanya beberapa penyerapan anggaran yang belum maksimal, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selalu berusaha untuk meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dan pada

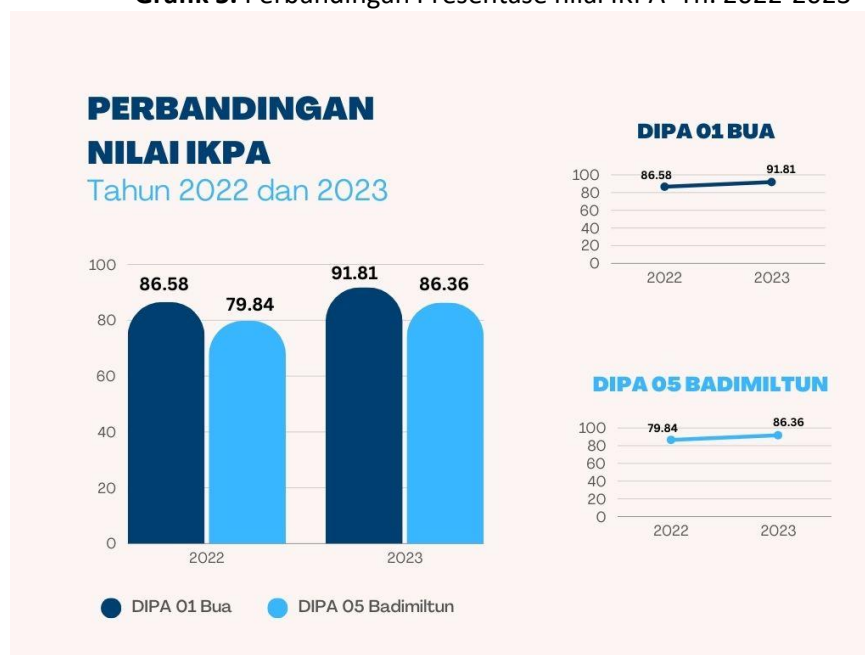
tahun 2023 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

DIPA 01 BUA : 91.81 kategori baik

DIPA 05 BADIMILTUN : 86.36 kategori cukup

Meski demikian, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2022. Terdapat kenaikan nilai IKPA sebesar 5.23 pada DIPA 01 dan 6.52 pada DIPA 05, perbandingan ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 5. Perbandingan Presentase nilai IKPA Th. 2022-2023



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya yang telah disusun ini, merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Laporan ini memberikan informasi Pencapaian Kinerja selama tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Hal ini diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan kinerjanya.

B. SARAN

1. Diperlukan peningkatan kinerja yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta peningkatan pelayanan terhadap para pencari keadilan agar terpenuhi kepuasan para pencari keadilan serta kemudahan dalam menjangkau badan peradilan;
2. Sinergitas setiap unit dan bagian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam usaha meningkatkan kinerja dan pelayanan internal dan eksternal;
3. Optimalisasi penyusunan dan pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja dan pelayanan tahun berikutnya;
4. Perlu adanya evaluasi dalam pengukuran untuk indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara dan indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

LAMPIRAN

1. Penghargaan
2. Inovasi
3. SK Pembentukan Tim Penyusun LKjIP
4. Reviu Indikator Kinerja Utama
5. Matriks Rencana Strategis tahun 2020-2024

PENGHARGAAN

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2023

1. Piagam Penghargaan kategori Pelaporan Perkara Pengadilan pada kegiatan Lomba Peningkatan pelayanan peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2023;



2. Piagam Penghargaan Kategori Video Pemberian Layanan Informasi Publik di Pengadilan pada kegiatan Lomba Peningkatan pelayanan peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2023;



3. Piagam Penghargaan Kategori Kinerja Agen Perubahan di Pengadilan di Pengadilan pada kegiatan Lomba Peningkatan pelayanan peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2023;



4. Piagam Penghargaan Kategori Inovasi Pelayanan Publik di Pengadilan pada kegiatan Lomba Peningkatan pelayanan peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2023

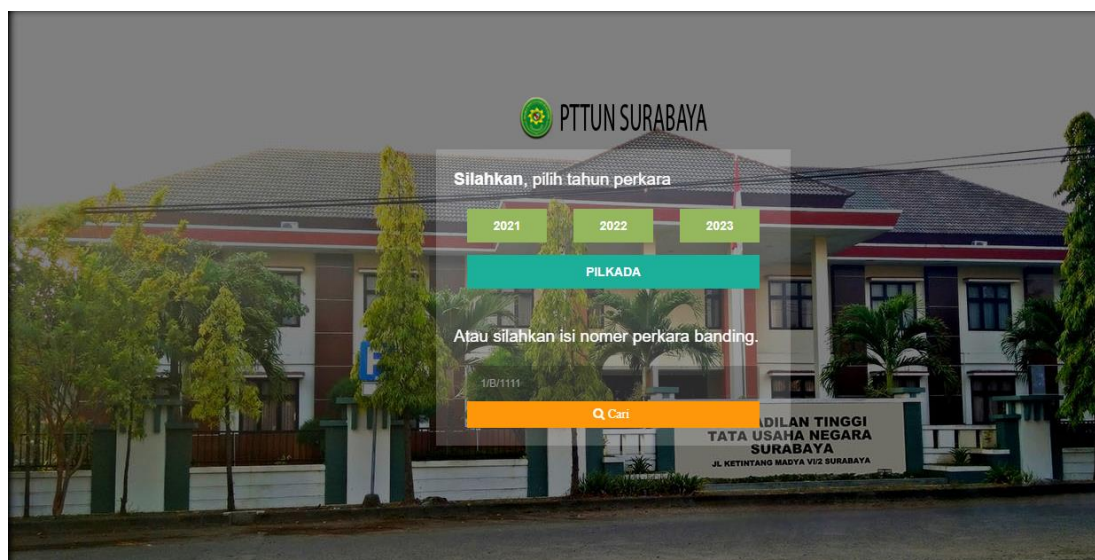


INOVASI

Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Surabaya :

1. Aplikasi SIRATUS (Sistem Informasi Perkara Putus)

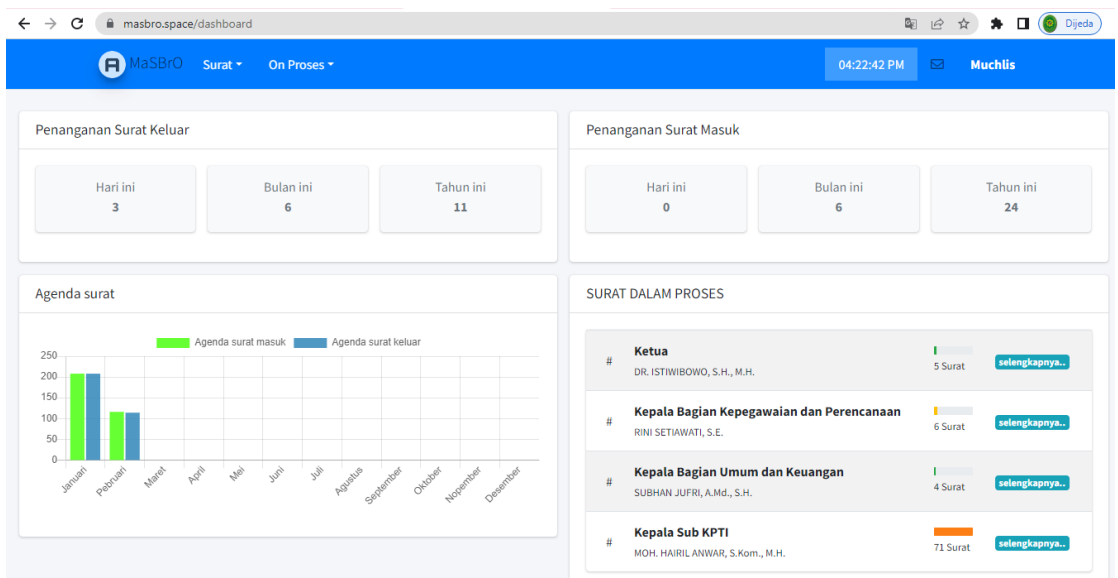
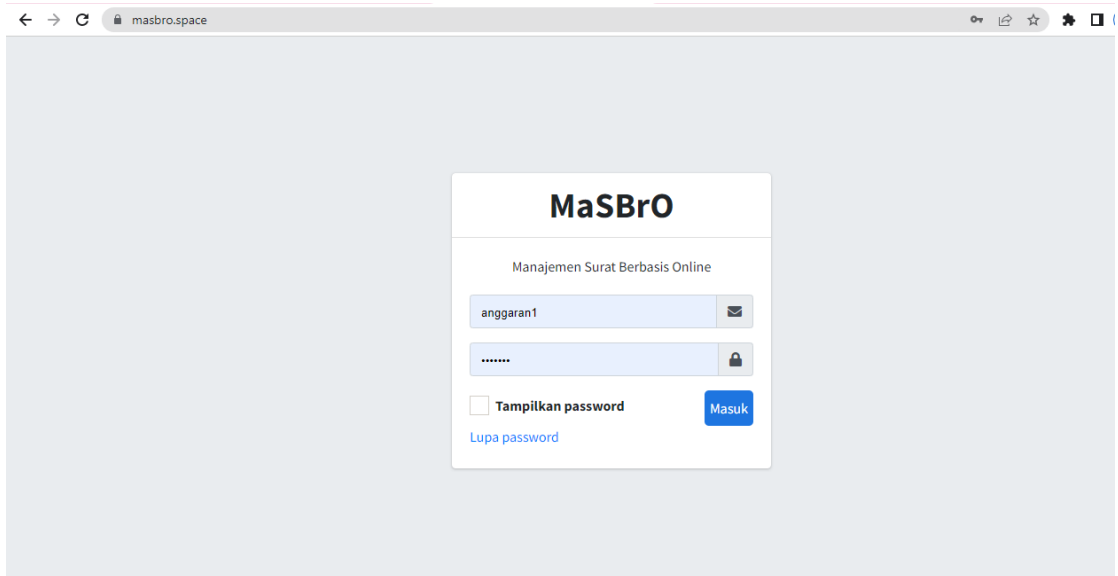
Aplikasi yang bertujuan memudahkan pencari keadilan memperoleh informasi data perkara yang telah diputus dapat diakses melalui website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (www.pttun-surabaya.go.id).



2. Aplikasi MasBro (Manajemen Surat Berbasis Online)

Bentuk inovasi persuratan menggunakan perkembangan teknologi informasi berbasis aplikasi web, digunakan untuk mempermudah pelayanan kepada pengguna mulai dari Ketua, sampai ke end user yaitu para pelaksana bagian surat di sub bagian di kesekretariatan dan panitera muda pada bidang

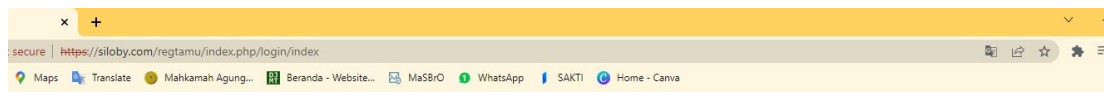
kepaniteraan. Inovasi MaSBrO ini mengurangi jumlah kertas yang dikonsumsi, karena mengurangi penggunaan buku agenda surat yang biasanya akan mudah terkena resiko rusak atau hilang.



3. Si Loby (Sistem Informasi Lobby)

Inovasi penggunaan layanan penerimaan tamu sebagai fasilitas untuk mempermudah pendataan tamu yang datang ke kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan dikendalikan oleh petugas PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berada di lobby disambut dengan ramah dan didata dari mulai nama, domisili, foto tamu, kartu tanda pengenal untuk memudahkan pelacakan jika ada kepentingan lebih lanjut untuk mudah

dihubungi Kembali. SiLoby ini juga merupakan teknologi paperless atau mengurangi jumlah konsumsi kertas di kantor, sehingga memberi kesan ramah lingkungan karena menghilangkan sampah kertas yang biasanya digunakan dalam pemakaian kertas atau buku.



Si-Loby
Sistem Informasi Loby PTTUN
Surabaya

User tidak dikenal
Mohon untuk menginput

Username
Password

Masuk

Dashboard Control panel

Selamat Datang, User pttun. Anda login dengan menggunakan hak akses sebagai Rekapitulasi

Tamu untuk anda

JML TAMU 186 dari total 196	TERKONFIRMASI 0 dari total 196	DITEMUI 0 dari total 196
--	---	---------------------------------------

Data Tamu Masuk

	MARIA KETTY DJAWA (SMK KRISTEN HARAPAN SEJATI) - 0 JAGRI SEKOMAKTI, JAGRI, WOKOROMKO, KOTA SURABAYA KUNJUNGAN MEGAWATI
	SLAMET DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROV. JATIM SURVEI PENJAJAN ASET
	Muhammad rishal alkhafid JL PERWU DAER UTARA NO 25 SEY KETERMU MEKAS ISKRI
	TRI SEPTO MUJI CAHYONO, S.H. SURABAYA INFORMASI PERBARA 2503023PTTUN SEY

Data Tamu Selesai

	MARIA KETTY DJAWA (SMK KRISTEN HARAPAN SEJATI) - 0 JAGRI SEKOMAKTI, JAGRI, WOKOROMKO, KOTA SURABAYA KUNJUNGAN MEGAWATI
	SLAMET DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROV. JATIM SURVEI PENJAJAN ASET
	Muhammad rishal alkhafid JL PERWU DAER UTARA NO 25 SEY KETERMU MEKAS ISKRI
	TRI SEPTO MUJI CAHYONO, S.H. SURABAYA INFORMASI PERBARA 2503023PTTUN SEY

Copyright © 2023, Wabiz Eksekusi - 0.9904, Penggunaan Memori: 2.58MB. All rights reserved. Version: 1.0



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
NOMOR : 03/KPTTUN.W3-TUN/OT1.6/1/2024**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA.**

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan sudah tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/241/PR.01/2/2023 tanggal 3 Pebruari 2023 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan membentuk kembali Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya,



**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. NIP. 19571011 198503 1 001
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. DISIPLIN. F. MANAO, S.H., M.H. NIP. 19610712 198803 1 006
3.	Ketua	APDIN TARUNA MUNIR, S.H., M.H. NIP. 19660810 199303 1 006
4.	Sekretaris	MOCH MUCHLIS, S.H. NIP. 19721003 200604 1 002
5.	Anggota	1. EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H. NIP. 19750907 200003 1 002
		2. MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H. NIP. 19640204 198603 1 005
		3. JANUARINI TRIDOSOSASI, S.H. M.H. NIP. 19700130 199303 2 002
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. MARDIUS SEPTIADI, S.H. NIP. 19720912 199203 1 001
		2. RINI SETIAWATI, S.E. NIP. 19750929 200604 2 002
		3. SUBHAN JUFRI, A. Md., S.H. NIP. 19760730 200003 1 001
		4. MIFTAH HIDAYATULLAH, S.E. NIPPPK. 19930718 2023211026

Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya,



**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing- masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya,



Istiwibowo



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
NOMOR : 146/KPTTUN.W3-TUN/RA1.9/1/2024**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Hasil rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Desember 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu – isu strategis Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya,




Istiwibowo

Istiwibowo

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan stakeholder</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak/Pengadilan Pengaju tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan : di Surabaya
 Pada Tanggal : 10 Januari 2024
 Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 Surabaya,

 Istiwibowo

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung

- MISI** :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi;
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Pemberian Standar Pelayanan Minimal bagi Pencari Keadilan serta SDM Tenaga Teknis yang Mumpuni (Berkualitas)	1	KGT	104.100.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
				b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	190	Perkara	104.100.000	
				c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	190	Perkara	104.100.000	
				d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	80%	80%	80%	45%	45%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	190	Perkara	104.100.000	

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
2.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	190	Perkara	104.100.000
		Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus			b.Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penyelesaian Perkara di Tk Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang tepat waktu	190	Perkara	104.100.000

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Rp.
														Jml	Sat	
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase Pembinaan ke Daerah		Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pembinaan ke Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen TUN 2. Pembinaan Adm. & Pengel. Keuangan BUA	1. Koordinasi 2. Layanan Perkantoran	2	Lynn	104.100.000 16.944.833.000
4.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen TUN	Koordinasi	1	Layanan	104.100.000
		Persentase Pengawasan ke daerah			b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Program Dukungan Manajemen	1. Peningkatan Manajemen TUN Pembinaan Adm. & Pengel. Keuangan BUA	1. Koordinasi Layanan Perkantoran	2	Layanan	104.100.000 16.944.833.000

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Surabaya, 15 Februari 2024

Pereviu I



Rini Setiawati, S.E.

Pereviu II



Mardius Septiadi, S.H.

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

No.	Pernyataan		Check List	
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓	✓
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓	✓
		6. Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓	✓
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	✓
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓	✓
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓	✓

Surabaya, 15 Februari 2024

Pereviu I





Rini Setiawati, S.E.

Pereviu II

Mardius Septiadi, S.H.



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

-  Jalan Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya
-  persuratanpttunsby@gmail.com
-  <https://pttun-surabaya.go.id>
-  (031) 8292138